


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai evaluasi terhadap hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya selama tahun tahun 2020 (Januari s.d. Desember 2020) sebagai penyelenggara program pemerintah di bidang kehutanan khususnya bidang keplanologian yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan DIPA kegiatan tahun 2020, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya telah menyelesaikan kegiatannya dan merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024. Renstra ini berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang telah disempurnakan yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan dalam upaya memenuhi tujuan utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.

Palangka Raya, Januari 2021

Kepala Balai

Deni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 199903 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
C. Sumber Daya Manusia	4
D. Permasalahan Yang Sedang Dihadapi.....	6
II. PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024	7
B. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020	9
C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).....	10
D. Perjanjian Kinerja	11
E. Reviu atas dokumen perencanaan	12
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran.....	15
IV. PENUTUP	16

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BPKH Wilayah XXI Palangka Raya yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BPKH merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

BPKH Wilayah XXI Palangka Raya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Balai Pejabat Administrator (Eselon IIIa) dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat Pengawas (Eselon IVa) yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan dan Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

BPKH Wilayah XXI Palangka Raya mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan dan penyajian data informasi sumber daya alam. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
- d. Pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- e. Penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan;
- f. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah;

- g. Pengumpulan dan pengolahan data Informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam untuk Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan Neraca Sumber Daya Alam;
- h. Pengelolaan system informasi geografis dan perpetaan kehutanan dan Tata Lingkungan;
- i. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Di samping TUPOKSI yang telah ditetapkan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI berkedudukan di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

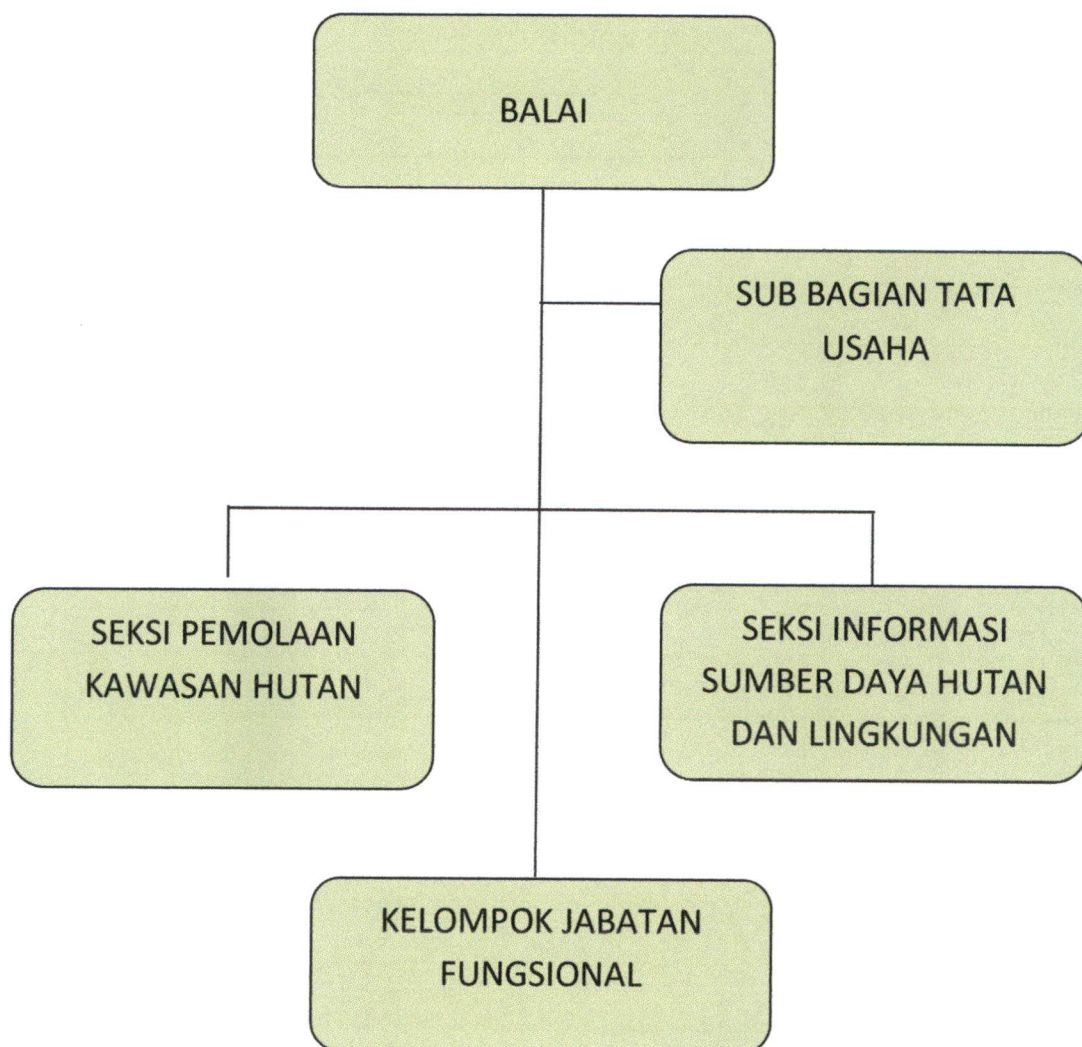
Penjabaran uraian tugas pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemolaan Kawasan Hutan dan Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Tugas pada masing-masing seksi/sub bagian sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- b. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan** mempunyai tugas penyiapan bahan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan; penataan batas dan pemetaan kawasan hutan; penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan; penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan.
- c. Seksi Informasi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan** mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan bahan penilaian penggunaan kawasan hutan; pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah; penyusunan dan penyajian data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam

(SDA); pengelolaan sistem informasi geografis kehutanan dan tata lingkungan; pengukuhan kawasan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan.

- d. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar :Struktur Organisasi BPKH Wilayah XXI Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016.

C. Sumber Daya Manusia

Deskripsi Sumber Daya Manusia pada BPKH Wilayah XXI Palangka Raya tahun 2020 berjumlah 58 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 32 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 26 orang. Pengalokasian pegawai pada masing-masing Sub Bagian/Seksi sebagai berikut:

Tabel. Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan s/d 31 Desember 2020

No	Uraian	2020				
		a	b	c	d	Jml
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>
1	Golongan IV	4	-	-	-	4
2	Golongan III	13	3	8	2	26
3	Golongan II	-	1	1	-	2
4	Golongan I	-	-	-	-	-
Jumlah						32

Tabel. Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin s/d 31 Desember 2020

No	Uraian	2020		
		LK	PR	JML
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
1.	Golongan IV	2	1	3
2.	Golongan III	23	4	27
3.	Golongan II	1	1	2
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah				32

Keterangan : LK = Laki-laki PR = Perempuan

Tabel.Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan s/d 31 Desember 2020

No	Uraian	2020		
		KH	NK	JML
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
1.	Pasca Sarjana	6	2	8
2.	Sarjana (S1)	16	4	20
3.	Diploma III	-	-	-
4.	Diploma I	-	-	-
5.	SLTA	3	1	4
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
Jumlah				32

Keterangan : KH = Kehutanan NK = Non Kehutanan

Tabel. Deskripsi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Tingkat Pendidikan s/d 31 Desember 2020

No	Uraian	2020		
		KH	NK	JML
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
1.	Pasca Sarjana	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	4	5	9
3.	Diploma III	1	-	1
4.	Diploma I	-	-	-
5.	SLTA/ SMK Kehutanan	6	8	14
6.	SLTP	-	2	2
7.	SD	-	-	-
Jumlah				26

Keterangan : KH = Kehutanan NK = Non Kehutanan

D. Permasalahan Yang di hadapi

Wilayah kerja BPKH Wilayah XXI Palangka Raya meliputi 1 (satu) Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015 – 2035 dari luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.514.811,71 ha dan selanjutnya mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.529/Kpts-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah luas kawasan hutan adalah 12.259.898 ha atau 80,10 % dari luas daratan, dan luas daratan Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.306.528 ha.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BPKH pada areal yang sangat luas tersebut, jumlah SDM yang belum memadai baik tenaga administrasi maupun teknis serta juga belum di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dalam mendukung pelaksanaan tugas.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan kurun waktu Tahun 2020-2024, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang merupakan kumpulan program intervensi yang harus menjadi bagian dari seluruh kegiatan teknis di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Program intervensi yang akan dikembangkan meliputi:

1. Intervensi Kebijakan

Kebijakan/regulasi/peraturan/NSPK yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

2. Intervensi Sumber Daya Manusia

Program pengembangan SDM (kualitas dan kuantitas) yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

3. Intervensi Teknologi

Teknologi yang diperlukan untuk mempermudah atau sebagai syarat pencapaian sasaran strategis BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

4. Intervensi Anggaran

Anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

5. Intervensi Kemitraan

Program pelibatan para pihak dan pengembangan kemitraan para pihak untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

Renstra BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang mana sebagai alat dalam penetapan target dan pemantauan implementasi kegiatan. Rencana strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan BPKH Wilayah XXI Palangka Raya yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian rencana strategis ini menjadi acuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH Wilayah XXI Palangka Raya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPKH Wilayah XXI Palangka Raya ini, diharapkan pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan selama 5 (lima) tahun dapat lebih terarah yang pada akhirnya pemantapan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terwujud pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis kegiatan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020, disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rencana Strategis (Renstra) BPKH Wilayah XXI Palangka Raya

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan									
	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Hektar	-	-	-	-	-	-
		Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan Hak-hak Pihak Ketiga	Km	1.440,5	5.778,03	5.139,20	-	-	12.357,73
		Dokumen Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen	-	-	-	-	-	-

		Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Hektar	13.000	104.971	105.073	106.521	106.521	436.086
	Terselesaikannya a pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Provinsi	1	1	1	1	1	1
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan									
	Tersedia dan termutakhirkan ya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Klaster	10	10	10	10	10	50
		Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	Dokumen	1	1	1	1	1	5

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Sesuai dengan rencana kerja BPKH Wilayah XXI Palangka Raya tahun anggaran 2020 diusulkan beberapa kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.22.682.045.000,-** (*Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Lima Ribu*) sesuai dengan pengesahan DIPA (APBN-P) Nomor: SP DIPA-029.06.2.145160/2020 tanggal 12 Desember 2019. Namun dengan adanya perkembangan situasi terbaru pada awal tahun 2020 yaitu dengan adanya pandemi COVID 19 yang melanda dunia dan Indonesia maka Anggaran yang semula direncanakan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi dampak dari pandemi sehingga ada beberapa kegiatan yang ditambahkan pada pertengahan tahun anggaran dan mulai di realisasi pada semester akhir tahun 2020.

Adapun rincian kegiatan dan anggaran Rencana Kerja 2020 sebagaimana tersebut pada Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Revisi Kegiatan dan Anggaran BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020

Program : Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kegiatan : Pemantapan Kawasan Hutan

No	Output	Sub Output	Komponen	Anggaran Awal			Anggaran Revisi		
				Vol	Satuan	Jumlah Biaya	Vol	Satuan	Jumlah Biaya
	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1. Dokumen Hasil Invetarisasi, Verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Inventarisasi dan Verifikasi Obyek TORA	1	Prov	2.632.035.000	1	Prov	2.036.370.000
		2. Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan Hak-Haka Pihak Ketiga	Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	1.449	Km	11.690.532.000	2.411	Km	14.864.751.000
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	10	Klaster	761.134.000	5	Klaster	294.345.000
		2. Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Data dan Informasi Tutupan Hutan Provinsi	1	Dokumen	109.402.000			
	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	10	Lokasi	693.000.000	6	Lokasi	243.076.000
	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	1	Dokumen	300.000.000			
	Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1. Layanan Dukungan Manejemen Satker	Layanan Dukungan Manejemen Satker	1	Layanan	1.070.980.000	1	Layanan	385.575.000
		2. Layanan Perkantoran	1. Gaji dan Tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1 1	Layanan Layanan	3.396.208.000 2.028.754.000	1 1	Layanan Layanan	3.434.524.000 1.990.438.000
	Jumlah					22.682.045.000			23.249.079.000

Hasil dari Perubahan tersebut adalah anggaran BPKH Wilayah XXI Palangka Raya menjadi sebesar **Rp.23.249.079.000,-** (*Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu*)

C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Tabel 3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Anggaran BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020

Program : Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kegiatan : Pemantapan Kawasan Hutan

No.	Output	Sub Output	Komponen	Vol	Satuan	Jumlah Biaya
	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1. Dokumen Hasil Inventarisasi, Verifikasi, BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan	Inventarisasi dan Verifikasi Obyek TORA	1	Prov	2.036.370.000
		2. Panjang Batas	Penataan Batas Kawasan Hutan	2411	km	14.864.751.000,-

		kawasan Hutan yang telah diselesaikan Hak-hak pihak ketiga	(Reguler)			
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber daya hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH	Inventarisasi sumber daya hutan	5	Klaster	294.345.000,-
	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	6	Lokasi	243.076.000,-
	Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen PKTL	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	1	Keg	92.300.000,-
			2. Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi	1	Keg	27.400.000,-
			3. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1	Keg	63.500.000,-
			4. Pengelolaan Kepegawaian	1	Keg	3.910.000
			5. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	Keg	198.465.000-
	Layanan Perkantoran	Operasional perkantoran	1. Pembayaran gaji dan tunjangan	12	Bulan	3.434.524.000
			2. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	Bulan	1.990.438.000-
			3.			

D. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Klaster TSP/PSP	5 Klaster
2.	Panjang batas yang telah diselesaikan hak – hak pihak ketiga	Berita acara tata batas kawasan hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan	2.411 Km
3.	Terinventarisasi dan Terverifikasinya obyek TORA Dalam Kawasan Hutan	Dokumen Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Obyek TORA Dalam Kawasan Hutan	1 Provinsi
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjmain Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 79,00 (A) di Tahun 2020.	Tata kelola Pemerintah yang baik di lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Optimal : - Layanan Perkantoran	1 Layanan

E. Reviu atas Dokumen Perencanaan

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan prioritas; antara lain yaitu Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran.

Dokumen perencanaan kinerja pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya disusun sudah melalui perencanaan matang yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi dan Tujuan dari Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan.

Kegiatan yang direncanakan meliputi semua tugas pokok dari BPKH Wilayah XXI Palangka Raya yang bertujuan untuk pemantapan kawasan hutan di

wilayah Kalimantan Tengah. Kegiatan juga disusun sudah mempertimbangkan kemampuan dan jumlah SDM yang ada pada BPKH Wilayah XXI palangka Raya sehingga dengan kinerja yang optimal pada akhir tahun anggaran 2020 akan dicapai sasaran fisik sebesar 100 % baik kualitas maupun kuantitasnya. Diharapkan dengan peran satgas SPIP maka kegiatan yang direncanakan akan dapat terlaksana dengan lancar.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil capaian kinerja BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020 melalui kegiatan DIPA Tahun 2020 untuk program Planologi dan Tata Lingkungan dengan kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan yang terdiri dari 4 (empat) *output* sub kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BPKH Wilayah XXI Palangka Raya seperti pada Tabel 3. berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 BPKH Wilayah XXI Palangka Raya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Klaster TSP/PSP	5 Klaster
Panjang batas yang telah diselesaikan hak – hak pihak ketiga	Berita acara tata batas kawasan hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan	1.430 Km
Terinventarisasi dan Terverifikasinya obyek TORA Dalam Kawasan Hutan	Dokumen Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Obyek TORA Dalam Kawasan Hutan	1 Provinsi
Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78,00 (A) di Tahun 2019.	Tata kelola Pemerintah yang baik di lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Optimal : Layanan Perkantoran	1 Layanan

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 BPKH Wilayah XXI Palangka Raya telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang lebih baik, seperti yang ada pada :

Tabel 4. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Jumlah Klaster yang telah di Inventarisasi Sumber Daya Hutannya	5 Klaster	5 Klaster	100
Panjang batas yang telah diselesaikan hak – hak pihak ketiga	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	1.430 Km	2.411 Km	169
Terinventarisasi dan Terverifikasinya obyek TORA Dalam Kawasan Hutan	Dokumen Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Obyek TORA Dalam Kawasan Hutan	1 Provinsi	1 Provinsi	100
Tersedianya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	5 Lokasi	5 Lokasi	100
Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 79,00 (A) di Tahun 2020.	Tata kelola Pemerintah yang baik di lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Optimal : Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

Adapun progres realisasi capaian kinerja pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan persentase capaian kinerja sebagaimana dapat dilihat perbandingannya pada Tabel 5. berikut:

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2019, Tahun 2018, Tahun 2017, Tahun 2016.

Program	Sasaran	Tingkat Capaian Kinerja							
		2017		2018		2019		2020	
		Keu %	Fisik %	Keu %	Fisik %	Keu %	Fisik %	Keu %	Fisik %
Planologi dan Tata Lingkungan	Terlaksanya penataan batas kawasan hutan sepanjang 40.000 km dan terbangunnya kesepahaman publik serta pengendalian pemantapan kawasan hutan	98,95	100	38,20	100	99,45	100	96,79	100
Planologi dan Tata Lingkungan	Pemantapan Kawasan Hutan	96,88	100	38,20	100	99,45	100	96,79	100

B. Realisasi Anggaran

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya selaku unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang mengemban tugas melaksanakan kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan kinerja BPKH Wilayah XXI Palangka Raya melalui kegiatan DIPA Tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 23.249.079.000,-** (*Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu*). Hasil capaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya TA. 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar **Rp 22.453.493.447,-** (*Dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh tiga empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah*) atau penyerapan keuangan sebesar 96,79 % dengan fisik sebesar 100%.

Terdapat penurunan persentase capaian realisasi keuangan disebabkan oleh terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan dimana terdapat jeda waktu kegiatan lapangan selama empat bulan akibat pandemi dan adanya tambahan

IV. PENUTUP

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2020 pada BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Sangat Baik Sekali. Hal ini ditandai dengan terealisasinya kegiatan program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2020 sebesar **96,79 %**. Namun demikian prestasi ini masih harus perlu terus ditingkatkan untuk pencapaian keberhasilan program dengan tujuan yang tepat sasaran yang berpedoman pada Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Persentase pencapaian kinerja kegiatan program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2020 pada BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, dari sumber anggaran tersedia dalam DIPA BPKH Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020, yakni:

1. Program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2020, sebesar **Rp. 23.249.079.000,-** (*Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu*),-.
2. Pencapaian kinerja kegiatan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi sebesar **Rp 22.453.493.447,-** (*Dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh tiga empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah*) atau penyerapan keuangan sebesar **96,79 %**

anggaran dan volume *output* yang cukup besar pada tiga bulan terakhir tahun 2020.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
Jabatan : Plt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI
Palangkaraya
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003



Pihak Pertama,

Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 19903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 145160. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI
PALANGKARAYA

No. /Kode	Kegiatan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayannya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayannya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangan dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	1 Dokumen
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	1.430Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	5 Klaster
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pangan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.013.	Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	1 Laporan

Kegiatan**Anggaran**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 5.810.537.000,- (Lima milyar delapan ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp. 16.901.121.000,- (Enam belas milyar sembilan ratus satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 294.345.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 243.076.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah)
Jumlah	Rp. 23.249.079.000,- (Dua puluh tiga milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003



Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XXI Palangkaraya,

Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 19903 1 007